

**EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DI KOTA PADANG TAHUN 2022**

SKRIPSI

Oleh:



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2024

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang disalurkan kepada keluarga miskin serta keluarga yang rentan terhadap resiko sosial. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Evaluasi kinerja kebijakan program keluarga harapan di kota padang dilakukan secara objektif menggunakan dimensi evaluasi kebijakan publik oleh Allan McConnell yang terdiri atas 3 dimensi dan terbagi menjadi 12 indikator sebagai instrumen analisis pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Padang tahun 2022 yang ditinjau dari Dimensi Proses pada indikator Legitimasi Kebijakan dan Keberlanjutan Politik berada pada posisi Kesuksesan Proses. Indikator Pengesahan Undang-Undang serta Inovasi dan Pengaruh berada pada posisi Kesuksesan yang Tangguh. Dimensi Program, indikator Operasional berada pada posisi Kesuksesan yang Tangguh sedangkan indikator Hasil berada pada posisi Kesuksesan yang Bermasalah. Indikator Sumber Daya dan Aktor berada pada posisi Kesuksesan Program. Dimensi Politik, indikator Popularitas Pemerintah berada pada posisi Kesuksesan Politik, indikator Peluang Terpilihnya Kembali Dalam Pemilihan Umum berada pada posisi Kegagalan Politik dan indikator Kredibilitas Pemerintah berada pada posisi Kesuksesan yang Bermasalah. Titik Kritis Dimensi Politik dalam pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan di Kota Padang sebagai kebijakan yang memikat secara politis terindikasi sebagai akar praktik klientelisme. Hal ini dikarenakan Program Keluarga Harapan berpotensi memberikan umpan balik kepada elit politik lokal yang memanfaatkan isu pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial sebagai alat untuk menarik simpati massa. Elit politik lokal melakukan klaim atas kebijakan tersebut dengan tujuan membangun kesan serta citra populis sebagai strategi potensial untuk mempertahankan massa tanpa harus mengeluarkan modal politik yang besar. Berdasarkan analisis dari masing-masing dimensi serta indikator evaluasi kebijakan, maka diperoleh hasil evaluasi yaitu *Greys Area In Between* yang berada pada posisi *Conflicted Success*. Hasil analisis tersebut mengindikasikan pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan ini bersifat tahan lama yang mencapai tujuan secara luas meskipun terdapat kendala serta ketidaksesuaian hasil yang diharapkan.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Keluarga Penerima Manfaat, Evaluasi.

ABSTRACT

The Family Hope Programme is a conditional social assistance programme that is distributed to poor families and families who are vulnerable to social risks. The implementation of the Family Hope Programme is regulated in the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Programme. The evaluation of the performance of the family hope programme policy in the city of Padang is carried out objectively using the dimensions of public policy evaluation by Allan McConnell which consists of 3 dimensions and is divided into 12 indicators as an analytical instrument in this study. This research uses a skinative approach with a case study research design. The results of the implementation of the Family Hope Program in Padang City in 2022 in terms of the Process Dimension on the indicators of Policy Legitimacy and Political Sustainability are in the position of Process Success. Indicators of Law Enactment and Innovation and Influence are in the position of Resilient Success. In the Programme Dimension, the Operational indicator is in the Strong Success position while the Outcome indicator is in the Troubled Success position. The Resources and Actors indicators are in the Programme Success position. The Political Dimension, the Government Popularity indicator is in the Political Success position, the Re-election Chances indicator is in the Political Failure position and the Government Credibility indicator is in the Troubled Success position. The Tipping Point of the Political Dimension in the implementation of the Family Hope Programme policy in Padang City as a politically appealing policy is indicated as the root of clientelism practices. This is because the Family Hope Programme has the potential to provide feedback to local political elites who use the issue of poverty alleviation and social welfare as a tool to attract mass sympathy. Local political elites make claims on the policy with the aim of building a populist impression and image as a potential strategy to retain the masses without having to spend large political capital. Based on the analysis of each dimension and indicator of policy evaluation, the evaluation results are obtained, namely the Greys Area In Between which is in the Conflicted Success position. The results of this analysis indicate that the implementation of the Family Hope Programme policy is durable and achieves broad goals despite obstacles and discrepancies in the expected results.

Keywords: *Family Hope Programme, Beneficiary Families, Evaluation.*